

ABSTRAK

Bahrudin Abas, 01011711034,2024. “Peran Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kawasan Sofifi Kecamatan Oba Utara” dibimbing oleh (Amirudin dan Resty).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kawasan Sofifi Kecamatan Oba Utara Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan Dan Observasi di Sofifi Kecamatan Oba Utara, tipe penelitian ini harus digunakan adalah empiris, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah kota tidore kepulauan dalam mengatasi pengelolaan sampah di Sofifi kecamatan oba utara berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat kawasan kecamatan oba utara kota tidore kepulauan. penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah daerah Kota tidore Kepulauan mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. , Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di Sofifi Kecamatan Oba Utara ialah hambatan berupa teknis yaitu hambatan kurangnya SDM, Hambatan kurangnya sarana dan prasarana yang baik, dan Hambatan mengenai TPA yang sering naik volume sampah hingga menutup akses untuk pengumpulan sampah. , Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tidak boleh terfokus pada kebijakan yang telah di susun saja tetapi memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan yang telah terjadi untuk menangani inkonsistensi ini. Perda Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tidore Kepulauan di Sofifi Kecamatan Oba Utara kurang adanya kepastian hukum sehingga banyak mengalami disorientasi serta lemahnya legitimasi hukum mengakibatkan cacat hukum.

Kata kunci : Peran Pemerintah, Pengelolaan Sampah, Perda